

PEMINDAHAN IBU KOTA INDONESIA

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Rohani Budi Prihatin

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
2021

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang 12 Tahun 1997, bahwa:

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

- I) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- II) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- III) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 20 (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEMINDAHAN IBU KOTA INDONESIA

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Rohani Budi Prihatin

Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
2021

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Perspektif Sosiologis | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama- 2021

viii + 115 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-623-97416-1-7

Cetak Pertama, Januari 2021

JUDUL: Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Perspektif Sosiologis

Penulis: Rohani Budi Prihatin

Editor: A. Muchaddam Fahham

Layout: Tim Kreatif Publica Institute

Cover: Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2020

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara 1 Lt. 2.

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerjasama dengan:

Publica Indonesia Utama

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu

Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera,

Alhamdulillahirrabbi 'Alamin. Saya menyambut dengan gembira terbitnya buku yang berjudul “PEMINDAHAN IBU KOTA INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIOLOGIS” yang ditulis oleh Rohani Budi Prihatin, seorang peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Kehadiran buku ini sangat penting, mengingat dalam kehariannya penulis buku ini mempunyai tugas memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI, khususnya di bidang sosiologi perkotaan.

Struktur buku ini terdiri atas 6 (enam) bab yang memiliki keterkaitan yang kesemuanya untuk memperkaya pembahasan mengenai perpindahan ibu kota yakni: (1) pendahuluan; (2) mengapa harus pindah?; (3) mengapa Kalimantan Timur?; (4) perbandingan dengan negara lain; (5) tantangan implementasi; dan (6) penutup.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi kepada penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah berusaha menuangkan hasil pemikiran yang terbaik bagi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Buku ini sangat layak dibaca para pengambil kebijakan dalam permasalahan pemindahan ibu kota yang saat ini tengah didiskusikan. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan rancangan dan

implementasi kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur namun juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Selamat membaca.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Desember 2020
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 19711117 199803 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Balik Sampul	iii
Halaman Penerbit	iv
Kata Pengantar	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 MENGAPA HARUS PINDAH?	16
BAB 3 MENGAPA KALIMANTAN TIMUR?	39
BAB 4 PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN	60
BAB 5 TANTANGAN IMPLEMENTASI	87
BAB 6 PENUTUP	100
INDEKS	105
DAFTAR PUSTAKA	107
IDENTITAS PENULIS.....	114

BAB 6

PENUTUP

Dari sisi historis, isu pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah beberapa kali diupayakan oleh presiden-presiden sebelum Presiden Joko Widodo namun pada akhirnya seringkali terbentur pada sisi eksekusi kebijakan. Secara politis, inilah momentum terbaik bagi Presiden Joko Widodo untuk mengimplementasikan ide pemindahan ibu kota karena Presiden mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen serta dukungan publik yang begitu kuat. Oleh karena itu, hasil studi yang lebih mendalam dan persiapan yang matang terutama dari sisi pembiayaan sangat diperlukan sehingga kegagalan pemindahan ibu kota tidak terjadi lagi.

Langkah yang diusulkan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan IKN didorong oleh kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi kelebihan penduduk di Pulau Jawa, keseimbangan infrastruktur antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, kelangkaan air dan tekanan ekologi lainnya yang dialami oleh Jakarta pada khususnya, dan Pulau Jawa pada umumnya. Kesemua hal tersebut juga sejalan dengan strategi nasional untuk mendorong pembangunan daerah di pulau-pulau terluar.

Pada dasarnya, motivasi negara untuk memindahkan ibu kotanya sangat beragam. Namun secara garis besar keputusan untuk memindahkan ibu kota diambil untuk mengatasi permasalahan politik, ekonomi, maupun budaya di negara tersebut. Sebagian besar pemindahan IKN didasari oleh permasalahan di IKN

sebelumnya. Permasalahan tersebut dapat berupa kemacetan, banjir, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Motivasi lain yang mendasari pemindahan IKN adalah upaya untuk pemeratakan pembangunan nasional, penguatan identitas bangsa, dan isu sosial politik/ketahanan.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sangat terlihat langkah untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur bertujuan untuk pemerataan wilayah secara demografis dan ekonomis. Kesenjangan porsi jumlah penduduk, kesejahteraan, ketersediaan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa dan antara Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Kawasan Indonesia Timur memang harus segera dipecahkan dan dicarikan solusi. Oleh karena itu, sangat bisa dipahami jika pemindahan IKN difungsikan sebagai solusi atas kesenjangan-kesenjangan tersebut.

Sementara itu, pilihan kenapa jatuh ke wilayah Kalimantan Timur sepenuhnya didasari pada faktor ketersediaan lahan milik pemerintah sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya investasi yang mahal guna pembayaran pembebasan lahan. Dengan adanya ketersediaan lahan, maka upaya pembangunan lokasi IKN akan dapat dipercepat proses perpindahannya.

Dari skema pembiayaan, terlihat bahwa porsi terbesar APBN ternyata yang paling kecil porsinya yaitu 19,2 persen atau Rp 93,5 triliun, disusul kemudian porsi swasta sebesar 26,2 persen atau Rp 127,3 triliun, dan yang terbesar justru Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yakni sebesar Rp 265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen dari total biaya pemindahan ibu kota. Melihat porsi pembiayaan tersebut terlihat bahwa pembiayaan pemindahan memang tidak akan memberikan beban ke APBN apalagi polanya menggunakan *multiyear*. Namun memberikan peluang pembiayaan lebih besar kepada porsi swasta dan KPBU juga berdampak pada kemandirian keputusan apalagi ini menyangkut IKN yang diproyeksikan sebagai proyek nasional dan mencerminkan nasionalisme dan jati diri bangsa.

Secara momentum, niat memindahkan IKN berbarengan dengan upaya penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga fokus pembiayaan Pemerintah lebih tercurah pada Covid-19 terutama upaya vaksinasi nasional daripada membiayai pemindahan IKN. Banyak pihak menyarankan agar proses pemindahan IKN ditunda dulu sampai dengan upaya penanggulangan Covid-19 berjalan tuntas. Dengan asumsi penanggulangan pandemi membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang (antara 2 atau 3 tahun ke depan), maka secara momentum sisa masa jabatan pemerintahan Joko Widodo tidak cukup untuk mewujudkan proses perpindahan pada tahun 2024. Singkatnya, pandemi Covid-19 merupakan ujian terbesar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo apakah akan lanjut memindahkan IKN ke Kaltim atau justru akan menundanya atau bahkan membatalkannya.

Berdasarkan pengalaman negara lain, pemindahan IKN juga tidak dengan sendirinya menjadi resep mujarab mengatasi kesenjangan dan pemerataan pembangunan wilayah. Beberapa fakta membuktikan bahwa kota bekas IKN seperti Yangon, Rio de Janeiro, Istanbul, atau Lagos tetap menjadi pusat perekonomian, meskipun pusat pemerintahan telah dipindahkan ke kota yang baru. Belajar dari kasus ini maka Kota Jakarta bisa jadi akan tetap menjadi magnet ekonomi walau IKN sudah pindah ke Kaltim.

Pemindahan ibu kota sering dimaknai sebagai transisi historis: misalnya dari monarki ke kekaisaran, dari kekaisaran ke negara-bangsa dan yang paling sering adalah dari negara kolonial ke bangsa merdeka. Umumnya, ibukota baru akan membantu negara tersebut membangun ikatan baru antara rakyat dengan negaranya sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa.

Dari sisi demografi, Kabupaten PPU dan Kukar di Kalimantan Timur memang minim konflik sosial. Tetapi bukan berarti tanpa masalah. Masalah yang paling mengkhawatirkan adalah sisi lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan yang

perlu diperhatikan. Kaltim merupakan wilayah yang terus dan terus digali mulai dari eksploitasi kayu melalui sistem HPH (Hak Penguasaan Hutan) hingga lanjut ke pertambangan batubara dan pola perkebunan sawit dan karet. Dari sisi lingkungan hidup, Kaltim sebenarnya wilayah yang sangat kritis, di mana terdapat ribuan lubang tambang yang membentuk cekungan dan perlu pemulihan ekologis dulu sebelum ditetapkan menjadi ibu kota.

Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, Provinsi Kaltim mempunyai karakter masyarakat yang terbuka dengan pendatang sehingga memudahkan proses akulturasi selama ini. Faktor keterbukaan kepada pendatang inilah yang menjadi prasyarat utama jika Kaltim akan dijadikan ibu kota negara.

Dari sisi sosial budaya, keunggulan yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur ini sudah cukup memungkinkan pemindahan IKN ke provinsi tersebut. Artinya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Memang ada yang mengkhawatirkan terutama soal sumber baku air bersih. Namun kekurangan daya dukung lingkungan prinsipnya dapat direkayasa dan diwujudkan. Batasannya adalah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan daya dukung lingkungan tersebut.

INDEX

A

aktifitas vulkanis 23

B

Badan Otorita 5

bencana banjir 3, 27

birokrasi 7, 98

D

daya saing 24

de facto 6

Dinasti Abbasiyah 7

Dinasti Umayyah 7

E

ekonomi 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14,
15, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 31,
32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45,
51, 53, 66, 68, 70, 72, 73, 76,
77, 80, 82, 83, 84, 93, 94, 96,
100, 102, 114

elit 8

etnis 7, 8, 10, 14, 55, 56, 69, 74,
76, 84, 85

F

faktor keamanan 3

G

gagasan 16, 30, 70, 74, 83

gempa bumi 3, 23, 33, 49, 84

gempa tektonik 24

gunung berapi 3, 23, 49

I

Identitas Bangsa 12, 52

inefisiensi 4

inefisiensi perekonomian 4

infrastruktur 3, 10, 21, 32, 33, 42,
57, 67, 69, 73, 86, 88, 89, 92,
93, 94, 100, 101

isolasi 11

K

kebakaran hutan 3, 45, 46, 47, 49

kekhalifahan 7, 65, 66, 67

kekuasaan 9, 16, 61, 62

kekuatan politik 2, 9, 46

kemiskinan 10

kepala pemerintahan 6

kerjasama Pemerintah dan Badan 87

kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBUS) 87

kerugian ekonomi 4, 21

kesatuan 7, 9, 52, 63, 87, 98, 102

kesehatan masyarakat 22, 41

kompromi 7, 8, 9, 29

konflik sosial 3, 29, 33, 44, 45, 97,

102

Konurbasi 25
kosmopolitan 7, 68

L

legislatif 14

M

mitigasi 11, 49
multifungsi 6

N

negara federal 6, 9

O

Opsi 24, 25

P

pekerja komuter 21
pembangunan bangsa 10, 28, 79,
84
pembangunan negara 7, 67, 72,
76, 77
pembebasan lahan 25, 64, 101
pemberontakan 10, 11, 80
pemerataan wilayah 26, 31, 101
penelitian 12, 81
penjajahan 9, 61
persatuan 7, 45, 72, 74, 75, 76, 87,
98, 102
polusi udara 17, 20, 32, 63

R

Relokasi 71
ruang terbuka hijau 28, 88

S

Sidang Paripurna DPR RI 4

Sidang tahunan MPR RI 2, 107
Simbolisme 14
skema pembiayaan 4, 5, 87, 101
strategi kompromi 8
subjektivitas 11
suplai air bersih 25

T

tanah longsor 3, 46
Tata Kelola 52
Teori Pembangunan Bangsa 9
teori pusat pertumbuhan 10, 70
tesis 9
tipologi 6, 9, 10, 11, 48
transportasi 4, 20, 36, 42, 62, 63,
68, 69, 77
tsunami 3, 33, 49

U

urbanisasi 17, 19, 20, 40, 42

W

wacana 5, 11, 14, 15, 98
wilayah perkotaan 3, 40, 53

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adejuyigbe, O. (1970). The Case for a New Federal Capital in Nigeria, *The Journal of Mod Corey, Kern African Studies*, 8:2, pp. 301-306.
- Adile Aslan Almond, 2019. The Capital and Its Shadows: Ankara and Istanbul, In Asuncion Lopez-Varela (Ed.), *Cityscapes: World Cities and Their Cultural Industries*, Illinois: Common Ground Publishing LLC.
- Asep Sofyan. 2019. “Permasalahan Lingkungan dan Analisis Daya Dukung Lingkungan di Ibukota Negara”, disampaikan pada Focus Group Discussion Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB, 7 Oktober 2019.
- Bappenas (2019) Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Minister’s presentation material, Jakarta, 20 August 2019.
- Bappenas. 2019. “Kajian Konsolidasi: Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara.”
- Calvin, C. (2010): Planning Citizens: Putrajaya and the 21st Century Malaysian [online]. Chicago, Illinois [cit. 2014-12-24], available at: http://www.elliscalvin.com/projects/Calvin_BA_Final.pdf. Bachelor Thesis (BA). University of Chicago.

- Corey, K. (2004): Relocation of National Capitals: Implication for Korea, IN International Symposium on the Capital Relocation, 22 September 2004, Seoul: Seoul Development Institute, pp. 42-107.
- Dascher, K. (2000): *Are politics and geography related? Evidence from a crossection of capital cities*, Public Choice, 105:3-4, pp. 373-392.
- Dijking, G. (2000): *European capital cities as political frontiers*, GeoJournal, 51:1-2, pp. 65-71.
- Dokumen Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam Sidang tahunan MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2019.
- Edward Schatz (2004) What Capital Cities Say About State and Nation Building, *Nationalism and Ethnic Politics*, 9:4, 111-140, DOI: 10.1080/13537110390444140
- Esfandiari, G. (2013). *Iran: A Capital Idea? Experts Disagree On Whether To Relocate Earthquake-Prone Tehran*. Radio Free Europe Radio Liberty [online]. 2013 [cit. 2014-11-23]. Available at: <http://www.rferl.org/content/article/1051104.html>.
- Everitt, J. (1986): *The Growth and Development of Belize City*, Journal of Latin American Studies, 18:1, pp. 75-111.
- Fujita, M. (2010): *Forays into Building Identity Kampung to Kampong in the Kuala Lumpur Metropolitan Area*, Journal of Architectural Education, 63:2, pp. 8-24.
- Gottmann, J. "The Study of Former Capitals." *Ekistics*, vol. 314/315 (Sept./Oct. -Nov./Dec. 1985), 541-546.
- Gottmann, J. and Harper, R. (1990): *Since Megalopolis*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Griffiths, I. (2005): *The African Inheritance*. London: Routledge.
- Griffiths, I. (2013): *The Atlas of African Affairs*. London: Routledge.

- Gritsal, O. and Wusten, H. (2000): *Moscow and St. Petersburg, a sequence of capitals, a tale of two cities*, GeoJournal, 51:1, pp. 33-45.
- Gul, M. (2009): *Emergence of Modern Istanbul: Transformation and Modernisation of a City*. London: Tauris Academic Studies.
- Hall, P. (1993): The Changing Role of Capital Cities: Six Types of Capital City, IN TAYLOR, J. (Ed.): *Capital Cities: Les Capitales : International Perspectives -Perspectives Internationales*. Ottawa: Carleton University Press.
- Hardoy, J. (1993): Ancient Capital Cities and New Capital Cities of Latin America, IN TAYLOR, J. (Ed.): *Capital Cities: Les Capitales: International Perspectives-Perspectives Internationales*. Ottawa: Carleton University Press.
- Harper, A. (2011): Islamabad and the Promise of Pakistan, IN KALIA, R. (Ed.): *Pakistan: From the Rhetoric of Democracy to the Rise of Militancy*. New Delhi: Routledge.
- Harlan, C. *In South Korea, fairness is the new ideal*. The Washington Post [online]. 2011 [cit. 2014-11-25]. Available at: http://www.washingtonpost.com/world/in-southkorea-fairness-is-the-new-ideal/2011/06/24/AGjAsooH_story.html.
- Harlan, C. *With new Sejong City, South Korean government aims to rebalance power*. The Washington Post [online]. 2012 [cit. 2014-11-25]. Available at: http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/with-new-sejong-city-southkorean-government-aims-to-rebalance-power/2012/08/17/e8f6dc60-e2bd-11e1-a25e-15067bb31849_story.html.
- Holford, W. (1962): *The Federal Capital of Brazil*, The Geographical Journal, 128:1, pp. 15-17.
- Ikoku, G. (2004): *The City as Public Space: Abuja - the Capital City of Nigeria*, Forum, 6:1, pp. 34-45.

- Illmann, Erik. *Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications*. Prague, 2015. 69 pages. *Bachelor Thesis (Bc.) Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Department of Political Science*. Supervisor of the Thesis PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
- Jamaludin, Adon. 2017. *Sosiologi Perkotaan: Mamahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*”. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Jenks and Burgess. 2000. *Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries*. Spon Press: London and New York.
- Kalipeni, E. (1992): *Population Redistribution in Malawi since 1964*, *Geographical Review*, 82:1, pp. 13-28.
- Kalipeni, E. (1999): *The Spatial Context of Lilongwe’s Growth and Development*, IN KALIPENI, E., ZELEZA, T. (Eds.): *Sacred Spaces and Public Quarrels: African Cultural and Economic Landscapes*. Trenton: African World Press.
- Kang, J. (2012): *A Study on the Future Sustainability of Sejong, South Korea’s Multifunctional Administrative City, Focusing on Implementation of Transit Oriented Development* [online]. Uppsala [cit. 2014-12-25], available at: <http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:571211/FULLTEXT01.pdf>. Master’s Thesis. Uppsala University.
- Kearns, K. (1973): *Belmopan: Perspective on a New Capital*, *Geographical Review*, 63:2, pp. 147-169.
- Kwon, Y. (2014): *Sejong Si (City): are TOD and TND models effective in planning Korea’s new capital*, *Cities*, not yet published.
- Kezer, Z. (2009): *Ankara*, In Makas, E., Conley, T. (Eds.): *Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Southeastern Europe*. London: Routledge.

- Kopbayeva, D. (2013): Is Astana a Nationalistic Project? The Role of Kazakhstan's New Capital in Development of National Identity, in *1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, 24-26 April 2013, Portugal*, pp. 800-813.
- Karami, A. Iran parliament approves bill to move capital from Tehran. IranPulse. [online]. 2013 [cit. 2014-11-23]. Available at: <http://iranpulse.al55monitor.com/index.php/2013/12/3530/iran-parliament-approves-bill-to-move-capitalfrom-tehran/>.
- Kim, S. South Korea Offers Romance Help for Lovelorn Officials. Bloomberg [online]. 2013 [cit. 2014-11-30]. Available at: <http://www.bloomberg.com/news/2013-09-11/south-korea-offers-romance-help-for-lovelorn-officials.html>.
- Mammadova, S. (2014): Iran's Capital Relocation Threatens Azerbaijani Minorities [online], Harvard International Review [cit. 2014-11-23], available at: <http://hir.harvard.edu/archives/3198>.
- Marsden, P. (1989): Brasília: Modern Day Stonehenge, *BMJ: British Medical Journal*, 299:6702, pp. 781-782.
- McGeown, K. *Burma's confusing capital move*. BBC News [online]. 2005 [cit. 2014-11-25]. Available at: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4416960.stm>.
- Moore, J. (1984): The Political History of Nigeria's New Capital, *The Journal of Modern African Studies*, 22:1, pp. 167-175.
- Mohamad Taufiq Afiff. 2019. "Dampak lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara", disampaikan pada *Focus Group Discussion Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB*, 7 Oktober 2019.
- Moser, S. (2010). Putrajaya: Malaysia's new federal administrative capital, *Cities*, 27: 285-297.
- Myoe, M. (2006): *The Road to Naypyitaw: Making Sense of the Myanmar Government's Decision to Move its Capital*, ARI Working Paper Series No. 79, Singapore: Asia Research Institute.

- Potts, D. (1985): *Capital Relocation in Africa: The Case of Lilongwe in Malawi*, *The Geographical Journal*, 151:2, pp. 182-196.
- Rapoport, A. (1993): On the Nature of Capitals and their Physical Expression, IN TAYLOR, J. (Eds.): *Capital Cities: Les Capitales: International Perspectives -Perspectives Internationales*. Ottawa: Carleton University Press.
- Rawat, R. (2005): *Capital City Relocation: Global-Local Perspectives in Search for an Alternative Modernity* [online], unpublished paper [cit. 2014-11-20], available at <http://prayaga.org/documents/paper-capitalcity.pdf>.
- Salmon, A. *Goodbye Seoul, Hello Sejong City*. SMARTPLANET [online]. 2014 [cit. 2014-11-25]. Available at: <http://www.smartplanet.com/blog/global-observer/goodbyeseoul-hello-sejong-city2/>.
- Schatz, E. (2003): *When Capital Cities Move: The Political Geography of Nation and State Building*, Working Paper #303, Notre Dame: The Helen Kellogg Institute for International Studies.
- Seekins, D. (2007): *The Geopolitics and Economics of Burma's Military Regime. Understanding SPDC Tyranny* [online], *The Asia-Pacific Journal* [cit. 2014-11-24], available at: http://www.japanfocus.org/-Donald_M_-Seekins/2573.
- Shelley, F. (2013): *Nation Shapes: The Story Behind the World's Borders*. Santa Barbara: Abc-Clio, LLC.
- Sherren Presentia Gunawan dan Ronald Hasudungan Irianto Sitindjak, "Implementasi Konsep East Kalimantan Journey pada Interior Museum Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman" di Tenggarong," *Jurnal Intra* Vol. 5, No. 2, (2017) 1-9.
- Slack, E. and Chattopadhyay, R. (2009): Introduction, In Slack, E., Chattopadhyay, R. (Eds.): *Finance and Governance of Capital Cities in Federal Systems*. Montreal: McGill-Queen's University Press.

- Smiley, S (2007): *Patterns of Urban Life and Urban Segregation in Dar Es Salaam, Tanzania*. Ann Arbor: Proquest.
- Snyder, D. (1964): *Alternate Perspectives on Brasília*, *Economic Geography*, 40:1, pp. 34-45.
- Souleimanov, E. et al. (2013): The Rise of Nationalism Among Iranian Azerbaijanis: A Step Towards Iran's Disintegration? *Middle East Review of International Affairs*, 17:1, pp. 71-91.
- Supriatna Sukardi dan E. Rustandi. 1995. *Geological Map of the Samarinda Sheet, Kalimantan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.
- Tasroh. 2020. "Ibu Kota Baru dan Akulturasi ASN," *Investor Daily*, Selasa, 10 September 2019, link <https://investor.id/opinion/ibu-kota-baru-dan-akulturasi-asn>. Data diakses 10 Desember 2020.
- Taylor, R. (1988): *Urban Development Policies in Nigeria: Planning, Housing, and Land Policy* [online], unpublished paper [cit. 2014-11-30], available at: <http://msuweb.montclair.edu/~lebelp/CERAFRM002Taylor1988.pdf>.
- Vale, L. (2006): The Urban Design of Twentieth Century Capitals, IN GORDON, D. (Ed.): *Planning Twentieth Century Capital Cities*. London: Routledge.
- Vale, Lawrence J. Vale. 2008. *Architecture, Power, and National Identity*, New York: Routledge.
- Whetstone, D. (2005): *Nursultan Nazarbayev's Influence on the Relocation of the Kazakh Capital* [online]. Tallahassee, Florida [cit. 2014-12-23], available at: <http://diginole.lib.fsu.edu/etd/1122/>. Master Thesis (MA). Florida State University.
- Wilmar Salim dan Siwage Dharma Negara. "Shifting the Capital from Jakarta: Reasons and Challenges." *ISEAS Perspective*, Issue 2019, No. 79.
- Wusten, H. (2000): *The cityscapes of European capital cities*, *GeoJournal*, 51:1-2, pp. 129-133.

Zimmermann, H. (1993): Berlin, Germany, IN TAYLOR, J. (Ed.): *Capital Cities: Les Capitales: International Perspectives - Perspectives Internationales*. Ottawa: Carleton University Press.

Media Massa

The Economist. *Myanmar: A capital move. According to astrologers, anyway* [online]. 2005 [cit. 2014-11-24]. Available at: <http://www.economist.com/node/5139038>.

<https://www.cnndonesia.com/nasional/20190910082419-20-428969/pakar-sebut-sumber-air-jadi-masalah-ibu-kota-baru>

“Presiden Joko Widodo akhirnya Umumkan Lokasi Pemindahan Ibukota Baru”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/26/presiden-joko-widodo-akhirnya-umumkan-lokasi-pemindahan-ibu-kota-baru-siang-nanti-pukul-1300-wib>.

“Ini Lima Alasan Dipilihnya Kaltim jadi Ibukota Baru”, <https://www.beritasatu.com/politik/571617/ini-lima-alasan-dipilihnya-kaltim-jadi-ibukota-baru>”.

“Tanpa Interupsi, Surat Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota dibacakan di Rapat Parpurna DPR”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/11530141/tanpa-interupsi-surat-jokowi-soal-pemindahan-ibu-kota-dibacakan-di-rapat>.

“Pindah Ibu Kota: Sulitnya Mencari Lokasi Paling Ideal”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190823/45/1140301/pindah-ibu-kota-sulitnya-mencari-lokasi-paling-ideal>.